

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Azwar, Azrul. 1990, Pengantar Ilmu Lingkungan. Mutiara Sumber Widya. Jakarta;
- A'an Efendi dan Freddy Poernomo, 2021, Hukum Administrasi, Cet. ke-3, Sinar Grafika, Jakarta;
- Bagir Manan, 2001, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta;
- Boer Mauna, 2022, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Edisi Kedua, Alumni, Bandung.
- Christopher Stone dalam Khalisa Hayatuddin dan Serlika Aprita, 2021, Hukum Lingkungan, Prenada Media, Jakarta.
- Deddy Mulyana, 2013, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Dinas, 2023, Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh., Laporan Kinerja DLHK Aceh Tahun 2022, Banda Aceh.
- Dwiyanto, 2014, Agus, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Emerson, 2015, Kirk dan Tina Nabatchi, Collaborative Governance Regimes, Washington DC: Georgetown University Press.
- Emil Salim, 2020, Lingkungan Hidup: Masalah, Kebijakan, dan Penanggulangannya, LP3ES, Jakarta.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Sayuti selaku Staf Pada Bidang Kebersihan dan Sanitasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe pada Tanggal 13 April 2026, Pukul 10.00 Wib.
- Hasil wawancara dengan Bapak Usman, S.E, selaku Kasi pada Bidang Kebersihan dan Sanitasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe pada tanggal 21 April 2026, Pukul 10.00 Wib.
- Hasil wawancara dengan Geuchik Gampong Pusong Baru Kota Lhokseumawe, pada tanggal 9 April 2026, Pukul 09.00 Wib.
- Hasil Wawancara dengan Ibu Juliani, Masyarakat Gampong Pusong Baru Kota Lhokseumawe, pada tanggal 9 April 2026, Pukul 11.00 Wib.

Hasil wawancara dengan Ibu Novi selaku Masyarakat Gampong Pusong Baru Kota Lhokseumawe, Pada tanggal 9 April 2026, pukul 10.00 Wib.

Helmi, 2023, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta.

Helmi, 2023, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta.

Hendra, 2018, S.N., Hukum Pencemaran Laut dalam Perspektif Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2020, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2020, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).

Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020).

Lawrence, 1984, M. Friedman,, American Law: An Introduction, New York: W.W. Norton & Company.

Lawrence, 1975, M. Friedman,, The Legal System: A Social Science Perspective, New York: Russell Sage Foundation.

Lawrence M. Friedman, 1990, The Republic of Choice: Law, Authority, and Culture, Cambridge: Harvard University Press.

M, 2016, Adli Abdullah,, Status Hukum dan Peran Panglima Laot dalam Sistem Hukum Adat Aceh, Banda Aceh: Pusat Studi Hukum Adat Aceh.

M, 2014, Jakfar Puteh,, Sistem Hukum Adat Laut Aceh dan Peran Panglima Laot dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Banda Aceh: Bandar Publishing.

Mas Achmad Santosa, Good Governance dan Hukum Lingkungan, (Jakarta: ICEL, 2001).

Mochtar, 2002, Kusumaatmadja,, Hukum Lingkungan di Indonesia Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.

Muhamad Erwin, 2022, Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup, Refika Aditama, Bandung.

Muhammad Akib, Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).

- Muhjad, H.M., Hukum Lingkungan: Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015).
- Munadjat, 1985, Danusaputro,, Hukum Lingkungan Buku I: Umum, Bandung: Binacipta.
- N urhayati, 2020, S, Pertumbuhan Penduduk dan Dampaknya terhadap Lingkungan Hidup, Jakarta.
- N.H.T. Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, (Jakarta: Erlangga, 2021).
- Nazir, 2017, M. Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Nybakken, J.W., Marine Biology: An Ecological Approach, 5th Edition, San Francisco: Benjamin/Cummings, 2001).
- Otto Soemarwoto, Ekologi Lingkungan Hidup, Djembatan, Jakarta, 2001, h lm. 52.
- Pemerintah Aceh, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017–2022 dan RPJMA Tahun 2023–2026, khususnya bagian kebijakan pembangunan lingkungan hidup dan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
- Peter, 1997, Salim, dan Yenny Salim. Kamus Besar Bahasa Indonesia Konteporer. Modern English Press, Jakarta.
- Philipus, 2002, M. Hadjon,, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rokhmin Dahuri, Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu, Edisi Revisi, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2022).
- Robert Agranoff dan Michael McGuire, 2003, *Collaborative Public Management*, Washington DC: Georgetown University Press.
- Santosa, 2020, Agus. Dampak Pencemaran Laut terhadap Ekosistem Pesisir, Deepublish, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cet. ke-9 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022).
- Sedarmayanti,, 2012, Good, Governance dan Good Corporate Governance, Bandung: Mandar Maju.
- Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Edisi Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya, 2005).

- Soedibyo, 2020, Manajemen Sampah dan Lingkungan Hidup, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soemarwoto, O., Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Edisi ke- 9, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2003).
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).
- Soewarno, 1997, Handayaniingrat. Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen. Cetakan Kedua,, PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Sugiyono, 2019, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, AlfaBeta, Bandung.
- Sunggono Bambang, 2016, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supriadi,, 2010, Hukum, Lingkungan di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Supriadi, 2021, Hukum Lingkungan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Supriadi, Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar, Sinar Grafika, Jakarta 2006.
- Swasta,, 2021, Ida, Bagus Jelantik. Bioekologi Ekosistem Laut dan Estuaria-Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).
- Syahrul Machmud, 2020, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Syahrul, 2012, Machmud,, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Takdir Rahmadi, 2018, Hukum Lingkungan di Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta: Rajawali Pers.
- Takdir Rahmadi, 2020, Hukum Lingkungan di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.
- Umar, 2021, Pengelolaan Sampah: Perspektif Lingkungan dan Sosial, Prenadamedia Group, Jakarta.
- UNEP, Marine Litter: A Global Challenge (Nairobi: UNEP, 2009).
- W.J.S. Poerwadarminta, 1989, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Wiratna, 2014, Sujarweni,, V. Metodologi penelitian. Pustaka Baru Perss, Yogyakarta.

Yusriadi,, 2023, “, Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Sampah Laut di Kawasan Pesisir,” Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.

B. Jurnal/ Skripsi/ Tesis dan Karya Ilmiah Lainnya

Aditia Syaprillah, “Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia,” *Fairness and Justice, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 9, no. 1, 2024, hlm. 45 - 67.

Amiruddin Pabbu, Nurhikma K., dan Jouharuddin, “ Tinjauan Hukum Terhadap Upaya Penanganan Sampah Plastik Sebagai Salah Satu Sumber Pencemaran Lingkungan Laut,” *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* Vol. 8 No. 12 (2024), hlm. 3.

Chris Ansell dan Alison Gash, “Collaborative Governance in Theory and Practice,” *Journal of Public Administration Research and Theory*, Vol. 18, No. 4, 2008, hlm. 544.

Dwi Wahyuni, “Pengelolaan Limbah Rumah Tangga untuk Menjaga Kesehatan Lingkungan,” *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, Vol. 19, No. 2, 2020, hlm. 75–83.

Febriani, “Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan,” *Jurnal Kebijakan Publik dan Lingkungan* 7, no. 1, 2018, hlm. 23.

Ilham Ubaidillah, Muhamad Rizky Jafar, dan Widiya Astuti, “Upaya Pelestarian Ekosistem Darat dan Laut melalui Pemberdayaan Masyarakat,” *Jurnal Dinamika Sosial dan Sains* 2, no. 2, 2025. hlm. 476.

M. Rizky Ramadhan, “Pengelolaan Sampah Tanggul Ulee Lheue dalam Upaya Menjaga Kelestarian Ekosistem Laut oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh,” *Jurnal Pengelolaan Lingkungan* 8, no. 1 2020, hlm. 55.

Putri, “Analisis Pengelolaan Sampah Pesisir dalam Upaya Pelestarian Ekosistem Laut,” *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Pesisir* 5, no. 2 2021, hlm. 112.

Rahmadani,“ Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 (Studi Kota Banda

- Aceh),” Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik 12, no. 2 (2020) hlm. 45.
- Ratna Sari dkk., “ Pembuatan Alat Pengering Ikan Tenaga Surya pada Kelompok Usaha Nelayan di Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe,” Jurnal Malikussaleh Mengabdi, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Richo Ramdani, Jurnal Pengelolaan Sampah di Kota Lhokseumawe, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2024, hlm. 45
- Ronaldy Lovina, Samsul Bahri, dan Lily Viruly, “ Dampak Pencemaran Mikroplastik Pada Ikan, Kerang dan Sedimen di Perairan Indonesia: Review,” Jurnal Pengendalian Pencemaran Lingkungan Vol. 6 No. 2 (2024), hlm. 11.
- Tansley, A.G., " The Use and Abuse of Vegetational Concepts and Terms", Ecology, Vol. 16, No. 3 (1935), hlm. 299-302.
- Yuliana Sukarmawati, Restu Hikmah Ayu Murti, dan Muhammad Abdus Salam, “Bahaya Lingkungan Pada Open Dumping Sampah Organik Perkotaan,” Jurnal Bengawan Solo 2, 2023, hlm. 90.
- Yuliana Sukarmawati, Restu Hikmah Ayu Murti, dan Muhammad Abdus Salam, “Bahaya Lingkungan Pada Open Dumping Sampah Organik Perkotaan,” Jurnal Bengawan Solo 2, no. 2 2023, hlm. 85–101.

C. Peraturan Perundang-Undangan dan Qanun

- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Profil Kelautan Indonesia (Jakarta: KKP, 2020),

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Pedoman Pengelolaan Limbah Rumah Tangga dan Limbah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Jakarta, 2021.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Perikanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62.

Pasal 156 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Pasal 157 sampai dengan Pasal 163 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62;

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut.

Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kelautan Aceh,

Qanun Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Kota Lhokseumawe

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pengendalian dan Perusakan Laut, PP No. 19 Tahun 1999, Pasal 2 dan 3.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 12 ayat (1) huruf e.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

United Nations, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, Pasal 1 ayat (4).